

TERKESAN LAYANAN 'SI KANCIL BERLARI - DRIVE THRU' KOTA BOGOR

## Bupati Harapkan Pelayanan Disdukcapil Kulonprogo Lebih Cepat

**KECEPATAN** pelayanan kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor Provinsi Jawa Barat (Jabar) benar-benar membuat Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo terkesan. Pihaknya berharap kecepatan dan pelayanan prima tersebut bisa diterapkan di Kabupaten Kulonprogo.

Pernyataan tersebut disampaikan usai menyaksikan langsung pelayanan kependudukan di sela kunjungan kerja di Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Bogor bersama Kepala Dnas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulonprogo Agung Kurniawan MSi dan Kepala Disdukcapil Ir Aspiyah serta Direktur Perumda Air Minum Tirta Binangun H Jumantera SE. Rombongan Bupati Sutedjo di terima Asisten Perekonomian dan

Pembangunan (Asperbang) Setda Kota Bogor Dody Ahdiat di Ruang Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Rabu (9/3).

Menurut Sutedjo inovasi layanan Dukcapil Kota Bogor layak dan patut dicontoh guna meningkatkan pelayanan publik di Kulonprogo.

"Kecepatan proses dan pelayanan prima Dukcapil Kota Bogor hendaknya menjadi motivasi bagi Dukcapil Kulonprogo sehingga ke depan lebih meningkatkan fungsi ketugasannya dalam hal ini pelayanan publik," tegas bupati.

Saat ini ungkapnya kecepatan layanan menjadi salah satu kunci keberhasilan pelayanan pemerintah kepada masyarakat selain kemudahan dan kepastian layanan. "Pemkot Bogor sudah *on the track* kinerja layanannya dan jujur Kulonprogo perlu belajar, manfaatnya banyak sekali, hal-hal



**Bupati Drs Sutedjo menerima cenderamata dari Asperbang Setda Kota Bogor Dody Ahdiat.**

yang belum kita lakukan ke depan hendaknya bisa dilaksanakan, mencontoh dalam hal kebaikan tentu positif," jelas Bupati Sutedjo. Sementara itu Asperbang Setda

Kota Bogor, Dody Ahdiat menjelaskan, inovasi yang dilakukan Disdukcapil setempat merupakan representasi visi dan misi Wali Kota Bogor, Bima Arya. Inovasi yang kami lakukan tidak lepas

dari Visi Kota Bogor yang dicitakan Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya yaitu 'Bogor Berlari', dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor," tuturnya.

Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto mengungkapkan sejumlah inovasi cemerlang yang dilakukan. Intinya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar mudah dan cepat dalam memenuhi kebutuhan mereka.

"Kunci keberhasilan pelayanan publik adalah pengambil kebijakan (bupati dan kepala dinas serta staf sama-sama memiliki semangat yang sama dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat. Kita harus memiliki komitmen memberikan layanan yang cepat dan mudah," kata Sujatmiko. Salah satu inovasi layanan

Disdukcapil Kota Bogor yang benar-benar mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat dan masyarakat Kota Bogor adalah layanan administrasi kependudukan online Si Kancil Berlari yang dikombinasikan dengan layanan *drive thru*, melalui kedua sistem tersebut masyarakat Kota Bogor lebih mudah dan cepat dalam pengambilan berkas.

Kepala Disdukcapil Kulonprogo Aspiyah mengakui primanya pelayanan dokumen kependudukan di Kota Bogor. Pihaknya berjanji apa yang didapat dari kunker akan diterapkan di Kulonprogo, sehingga ke depan semua pelayanan dokumen kependudukan di kabupaten ini bisa lebih cepat dan efektif tanpa ribet dengan dalam mengurus dokumen kependudukan.

(Asrul Sani)-d

## BANTU PERANGI PAHAM RADIKAL Gedung Ponpes Darush Sholihin Diresmikan



**Peresmian gedung TPA Ponpes Darush Sholihin.**

**WONOSARI (KR)** - Wakil Bupati Gunungkidul Heri Susanto MSI meresmikan Gedung TPA Pondok Pesantren (Ponpes) Darush Sholihin Warak, Girisekar, Panggang, Senin (14/3). Gedung 3 lantai ini untuk TPA, Mading dan ponpes. Serta juga diresmikan gedung putih untuk masjid. Bersamaan juga diserahkan izin operasional ponpes.

"Keberadaan ponpes diharapkan mampu menciptakan generasi penerus yang mampu melanjutkan kepemimpinan dan membentuk akhlak mulia. Termasuk ikut memerangi berkembangnya paham radikalisme," kata Heri Susanto.

Kegiatan dihadiri Kepala Kantor Kemenag Gunungkidul H Saiban Nuroni MA, Ketua MUI H Asrofi, Pimpinan Ponpes Darush Sholihin Muh Abduh Tuasikal, muspika dan undangan. Ustad Abduh Tuasikal mengungkapkan, Awalnya kegiatan berupa TPA sebanyak 600 santri. Berkembang menjadi pengajian umum pada 2013 hingga sekarang menjadi ponpes. "Untuk sekarang jumlah santri sebanyak 37 orang," ucapnya.

Sementara itu Kepala Kantor Kemenag H Saiban Nuroni menambahkan, keberadaan ponpes diharapkan mampu meningkatkan pondasi keagamaan yang kuat.

(Ded)-d

## PPKM LEVEL 4 DI DIY HANTUI Pemulihan dan Kebangkitan Usaha Anggota PHRI



**Bupati di antara pengurus PHRI DIY dan Kabupaten Gunungkidul.**

**WONOSARI (KR)** - Sekjen DPD PHRI DIY Herman Tony meminta pemerintah dalam menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sekarang ini berbeda dengan level 4 yang dulu. Sekarang ini instrumennya sudah berbeda, sebagian besar masyarakat sudah melakukan vaksin 1 dan 2 bahkan sudah banyak yang booster. Protokol kesehatan terus digencarkan. Sehingga perlu ada kelonggaran dalam kunjungan wisatawan, masuk hotel dan restoran.

Awal tahun sebenarnya tingkat kunjungan hotel dan restoran sudah sekitar 60 persen, tetapi sejak diumumkan PPKM level 4 kembali turun menjadi sekitar 20 persen sampai 30 persen. "Pembelakangan PPKM level 4 ini menghantui pemulihan dan kebangkitan usaha PHRI," kata Sekjen DPD PHRI DIY Herman Tony saat hadir dalam Rapat Kerja (Raker) yang diselenggarakan DPC PHRI Gunungkidul di RM Bu Tiwi, Mijahan Semanu, Senin (14/3).

Rakercabang (Rakercab) yang dibuka Bupati Gunungkidul H Sunaryanta, dihadiri ketua Ketua DPD PHRI DIY, Sekjen Herman Tony beserta pengurus dan sejumlah tamu undangan lainnya. Ketua BPC PHRI Gunungkidul Sunyoto SH dalam sambutannya mengatakan, Rakercab digelar dengan semangat guyup bersama untuk menghasilkan kebijakan yang akan dijalankan setahun ke depan.

Menurutnya, saat ini mempunyai 94 anggota aktif. Dari jumlah tersebut sebagian pengusaha mengelola usaha mereka di pantai dan di pusat kota Wonosari. "Pengelola hotel sebanyak 40 persen, restoran 46 persen dan lain-lain 14 persen. Ada 37 persen lebih berada di wilayah pantai, dan 14 persen di pusat Kota Wonosari," tambahnya.

Sementara Bupati Gunungkidul, Sunaryanta mengatakan, pandemi menjadi tantangan berat bagi pengelola hotel dan restoran. Bupati berharap dengan dibukanya 27 destinasi wisata saat ini memberikan dampak baik bagi PHRI. "Saya juga berpesan kepada anggota PHRI untuk tertib membayar pajak. Berdasarkan pemantauan saat ini tingkat kesadaran masih sangat minim," ujarnya.

(Ewi)-d

## LOKASI BENCANA PUTING BELIUNG MULUSAN

# Stok Makanan untuk Relawan di Dapur Umum Habis

**WONOSARI (KR)** - Dapur umum posko tanggap darurat bencana angin puting beliung di Kalurahan Mulusan kekurangan logistik terutama kebutuhan pokok bahan makanan. Beberapa jenis kebutuhan sudah habis pada Senin (14/3) kemarin.

Saat ini untuk dapur umum relawan hanya mengandalkan bantuan donatur maupun komunitas serta anggaran Pemerintah Kalurahan. Sementara hingga kini, bantuan logistik dari Pemkab Gunungkidul masih belum turun. "Saat ini kebutuhan untuk dapur umum posko pusat tanggap darurat bencana Kalurahan Mulusan

mulai menipis," kata Koordinator Posko Tagana Gunungkidul, Wagiy, Senin (14/3).

Dapur umum sendiri dioperasikan untuk mencukupi kebutuhan makanan para relawan dan warga yang sedang bekerja bakti. Selama ini, pihaknya untuk mencukupi kebutuhan bahan pokok di dapur umum hanya mengandalkan pem-



**Dapur umum relawan bencana puting beliung Mulusan.**

berian dari pemerintah Kalurahan Mulusan dan donatur. Sebenarnya saat ini membutuhkan minyak goreng dan beras karena stok habis untuk persiapan makan sore. Sehingga untuk hari berikutnya masih

menunggu logistik dari posko. "Dapur umum untuk posko ini rencananya dijadwal hingga Rabu (16/3) besok," kata Wagiy. Ia berharap agar kebutuhan logistik permakanan di dapur umum posko tanggap daru-

rat dapat segera dipenuhi agar tidak mengganggu kebutuhan makanan bagi relawan dan masyarakat yang sedang melaksanakan kerja bakti. Untuk membuat nasi bungkus tiap hari antara 400 sampai 500 bungkus.

Wagiy mengungkapkan dirinya sudah melaporkan ke posko terkait dengan menipisnya stok bahan pokok di dapur umum. Ketika nantinya belum ada penambahan stok bahan pokok, ia menyayangkan jika pihaknya hanya dapat memanfaatkan bahan yang ada untuk membuat nasi bungkus bagi relawan.

(Bmp)-d

## Bawaslu Kerja Sama dengan 10 OPD Kulonprogo

**WATES (KR)**-Pelaksanaan Pemilu dan pemilihan yang dilaksanakan secara serentak tahun 2024 memiliki potensi atau kerawanan yang lebih tinggi dan kompleks dibanding pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada sebelumnya. Untuk meminimalisir pelanggaran yang mungkin terjadi, Bawaslu Kulonprogo melakukan beberapa inovasi pencegahan, bekerja sama dengan Pemkab Kulonprogo dan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama maupun Perjanjian Kerja Sama yakni dengan 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal itu dikatakan Ketua/Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Kulonprogo Ria Harlinawati SIP MA di sela-sela penandatanganan kerja sama tersebut, Senin (14/3). Kesepakatan bersama ini berkaitan tentang pengawasan partisipatif, pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan di Kulonprogo.

Diungkapkan Ria, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas Bawaslu di antaranya adalah melakukan pencegahan dan

penindakan pelanggaran maupun sengketa proses pemilu. Oleh sebab itu dalam rangka mempersiapkan perhelatan demokrasi di Kulonprogo, khususnya Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024, pihaknya melakukan berbagai macam inisiatif pencegahan pelanggaran Pemilu. "Pencegahan pelanggaran bersifat luas dan tidak terbatas, sehingga berbagai inovasi pencegahan dapat dilakukan Bawaslu dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran, selama masih dalam koridor prinsip dan kode etik penyelenggara Pemilu," terang Ria.

Terkait itu, Bupati Kulonprogo menyambut baik kerja sama yang ditawarkan oleh Bawaslu setempat, mengingat Pemkab juga memiliki semangat yang sama untuk mengawal proses demokrasi yang bersih. "Sebelumnya kami sudah menandatangani kesepakatan bersama pada 24 Desember 2021. Selanjutnya ditindaklanjuti perjanjian kerja sama dengan 10 OPD," ujar Sutedjo.

Kesepuluh OPD tersebut Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMD-Daldu KB), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Dinas Kebudayaan (Disbud), Dinas Pariwisata (Dispar), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama tersebut di antaranya sosialisasi pengawasan partisipatif melalui program yang dimiliki OPD. Selain itu, sinergi program dilakukan juga melalui kegiatan kegiatan yang bersifat mendukung tugas pengawasan Pemilu Bawaslu Kulonprogo. Jangka waktu perjanjian Kerja Sama tersebut belaku selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama.

"Beberapa program dan kegiatan telah dirumuskan Bawaslu dengan OPD untuk menjadi kegiatan bersama dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan tahun 2024," ucap Ria.

(Wid/Rul)-d

## ANTISIPASI LAKALANTAS TIMPA PELAJAR Pemkab Gunungkidul Luncurkan Layanan Gratis Bus Sekolah

**WONOSARI (KR)** - Dinas Perhubungan (Dishub) Gunungkidul akan mengoperasikan bus sekolah secara gratis untuk pelajar yang akan berangkat dan pulang sekolah. Program ini ditargetkan direalisasi pada akhir Maret 2022. "Program ini dibuat karena melihat banyak kasus kecelakaan menimpa anak usia sekolah," kata Rakhmadian Wijayanto, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, Senin (14/3).

Selain mencegah kecelakaan lalu-lintas, kebijakan Pemkab juga bertujuan untuk meminimalisir adanya pelajar di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor.

Dengan adanya program layanan gratis bus sekolah ini dishub dan Pemkab akan secara matang melakukan berbagai persiapan. Mulai dari kelayakan bus, pengemudi, hingga standar keamanan bus yang nantinya sudah di pastikan siap digunakan.

"Pengoperasian, bus sekolah ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelajar di semua jenjang pendidikan," imbuhnya. Kepala Bidang Angkutan dan

Terminal, Dishub Gunungkidul, Agus Hendro Kusumo, menyatakan, rencana pengoperasionalan bus sekolah ini dilatarbelakangi dari semakin banyaknya pelajar yang menggunakan sepeda motor ketika menuju ke sekolah. Selain itu juga berharap keberadaan bus sekolah dapat mengantisipasi kecelakaan dan mencegah pelajar di bawah umur mengendarai motor. Layanan bus sekolah gratis ini prioritasnya untuk Kapanewon Gedangsari, Karangmojo dan Semanu. "Pembahasan masih terus dilakukan termasuk penentuan jurusan," katanya.

Kaurbanops Satlantas Polres Gunungkidul Iptu Ristanto menyambut positif rencana dishub dan Pemkab akan mengoperasikan bus gratis untuk pelajar. Dari data tahunan jumah kecelakaan lalu-lintas melibatkan korban di bawah umur masih terus terjadi. Dengan adanya bus sekolah diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya kecelakaan, mengurangi kepadatan lalu-lintas dan mengurangi kemacetan lalu-lintas. "Tahun ini diharapkan sudah mulai operasional," ucapnya.

(Bmp)-d

## PCN WILAYAH DIY PEDULI Bagikan Ratusan Sembako dan Bedah Rumah

**KALIBAWANG (KR)** - Manajemen Pradana Cahaya Nasional (PCN) membagikan ratusan paket sembako secara gratis kepada masyarakat di wilayah Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulonprogo. Bakti sosial (baksos) untuk meringankan beban masyarakat di tengah tingginya harga sembako termasuk minyak goreng.

Menurut Kepala PCN Wilayah DIY, Hardian Satria Jati, pembagian ratusan paket sembako bagi warga kurang mampu tersebut di pusatkan di Balai Kalurahan Banjarasri dan Banjarharjo, Kalibawang, Senin (14/3).

Asosiasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan tersebut juga memberikan bantuan bedah rumah

dan lampu penerangan jalan umum (LPJU).

"Bantuan yang kami distribusikan murni gerakan sosial dan masyarakat penerima tidak dipungut biaya apapun. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian sosial kami agar masyarakat merasa sedikit ringan menghadapi beban hidup yang demikian berat," katanya.

Disinggung tentang sumber dana, Hardian Satria Jati mengungkapkan berasal dari para investor, *corporate social responsibility* (CSR) dan Penanaman Modal Asing serta hibah. "Sehingga tidak ada pungutan ke penerima dan pemerintah terkait," katanya di sela penyerahan paket sembako di halaman Balai Kalurahan Banjarasri.

(Rul)-d



**Kepala PCN Wilayah DIY, Hardian Satria Jati (kanan) menyerahkan bantuan sembako secara simbolis pada warga.**

KR-Asrul Sani